

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA,
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN
2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkah dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber dan kebijaksanaan. Selain itu, penyusunan LAKIP ini berdasarkan evaluasi dan analisa capaian kinerja kegiatan dengan sasaran dan mengacu pada Rencana Strategis 2023 – 2026 dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun pertama dalam periode Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dari penyusunan LAKIP ini adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan analisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Walaupun telah diupayakan seoptimal mungkin melalui pendekatan koordinasi, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi oleh masing-masing bidang terkait.

LAKIP ini dapat menjadi panduan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur untuk meningkatkan kinerja organisasi sesuai dengan tujuan, sasaran, program, dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bahan masukan dan partisipasi aktif dalam penyusunan laporan ini.

Larantuka, Januari 2024

1/ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak



1/ Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos
NIP 19670420 199703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
SISTEMATIKA PELAPORAN	7
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	8
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang	10
1.2 Profil dan Sejarah Singkat	10
1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi	11
1.4 Dasar Hukum.....	20
1.5 Permasalahan dan Kelemahan.....	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	22
2.1 Pernyataan Visi.....	22
2.2 Perencanaan Kinerja	22
1.3 Indikator Kinerja Utama.....	24
1.4 Rencana Kerja Tahunan.....	31
1.5 Penetapan Kinerja Tahun 2023	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	45
3.1 Capaian Kinerja	45
3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis.....	45
3.2 Realisasi Anggaran.....	48
3.2.1 Target dan Realisasi Belanja.....	48
3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan.....	48
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kinerja Perangkat Daerah.....	71
4.2 Rekomendasi tindak Lanjut.....	71

DAFTAR TABEL/GAMBAR

	Hal.
Tabel 1.....	9
Tabel 2.2.....	23
Tabel 2.3.....	24
Tabel 2.4.....	31
Tabel 2.5.....	32
Tabel 2.5.1.....	35
Tabel 3.1.....	46
Tabel 3.2.....	47
Tabel 3.3.....	47
Tabel 3.2.2.....	49
Tabel 3.5.....	33
Tabel 3.6.....	36
Gambar 1.1.....	19
Gambar 1.2.....	19
Gambar 1.3.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran IKU
Lampiran SOP
Lampiran PK

SISTEMATIKA PELAPORAN

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2023 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya. Sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut :

Pendahuluan

Berisi penjelasan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategis serta permasalahan yang dihadapi.

Perencanaan Kinerja

Berisi penjelasan rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2023-2026; tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, perjanjian kinerja, monitoring dan evaluasi pencapaian rencana strategis tahun 2023.

Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2022 beserta realisasi anggaran, perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

Penutup

Berisi kesimpulan atas Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pada pasal 56 Ayat (1) BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memiliki tugas melaksanakan Pengendalian Penduduk dan menyelenggarakan Keluarga Berencana. Kemudian untuk melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 56 Ayat (2) BKKBN mempunyai fungsi antara lain : a). perumusan kebijakan nasional; b). penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK); c). pelaksanaan advokasi dan koordinasi; d). penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi; e). penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi; f). pembinaan, pembimbingan dan fasilitas di Bidang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana.

Laporan kinerja tahun 2023 merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur berupaya meningkatkan kinerjanya dalam rangka mencapai tujuan strategis. Untuk memastikan tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat tercapai, maka telah ditetapkan sasaran strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah merumuskan sasaran program dan menetapkan indikator sasaran program sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan strategis. Sasaran program beserta indikatornya ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja selama tahun 2023. Laporan Kinerja juga dimanfaatkan sebagai alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan negara yang berkualitas.

Hasil penilaian kinerja tahun 2023 menunjukkan bahwa dari Lima (5) indikator kinerja tidak seluruhnya tercapai. Ikhtisar capaian tersebut tampak sebagai berikut:

Tabel: 1 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi (%)
1	Cakupan PUS Peserta KB Aktif	53,63	42,81
2	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,1	2,58
3	Indeks Pembangunan Gender	3,1	92,08
4	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	20	84
5	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	25	84

Uraian capaian program tersebut adalah :

1. Cakupan PUS Peserta KB Aktif, Pencapaian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk IKU 1 adalah sebesar 42,81 % dari target 53,63% ini diakibatkan rendahnya capaian peserta KB untuk tahun 2023.
2. Angka Kelahiran Total (TFR) sebesar 2,58 % ini menunjukkan masih tingginya angka kelahiran.
3. Indeks Pembangunan Gender sebesar 92,08 ini menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia Laki- Laki dan Perempuan sudah baik tidak ada ketimpangan
4. Jumlah Kasus Terhadap Perempuan sebesar 84 kasus ini menunjukkan bahwa masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan
5. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak sebesar 84 kasus ini menunjukkan bahwa masih tingginya juga kasus kekerasan terhadap anak.

Dari 5 indikator kinerja utama, yang targetnya terpenuhi ada satu indikator, sedangkan yang lainnya belum terpenuhi sesuai target. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah berupaya seoptimal mungkin untuk mencapai target indikator kinerja tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Profil dan Sejarah Singkat

Pembangunan Kependudukan dan KB merupakan salah satu program sosial dasar yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk dan sekaligus berkontribusi terhadap pengendalian pertumbuhan penduduk. Program ini merupakan investasi jangka panjang yang keberhasilannya akan menjadi pondasi bagi tumbuhnya keluarga yang berkualitas yang pada akhirnya memberi peluang bagi terciptanya sumber daya manusia dan generasi masa depan yang tangguh dan mandiri.

Program KB di Kabupaten Flores Timur pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 dan pada saat itu nomenklatur BKKBN adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Namun di tahun 2009 diterbitkan Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sehingga berimplikasi terhadap perubahan kelembagaan, visi dan misi BKKBN. Undang-undang tersebut mengamankan perubahan kelembagaan BKKBN yang semula Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Jika dilihat situasi dan kondisi masalah kependudukan di Kabupaten Flores Timur memerlukan perhatian dan penanganan yang seksama, lebih sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Salah satu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memperkuat program KKBPK hingga ke pelosok-pelosok daerah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.3 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Kedudukan dan Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor: 78 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Fungsional Perencana.
- c. Bidang Pengendalian Penduduk:
 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- d. Bidang Keluarga Berencana:
 1. Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
- e. Bidang Pemberdayaan Perempuan:
 1. Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
- f. Bidang Perlindungan Anak:
 1. Fungsional Analisis Kebijakan

Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pelaksanaan administrasi dinas;
 - d. pembinaan, pengoordinasian dan pengendalian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat:

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (1) Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan, mengarahkan dan mengoordinasikan urusan ketatausahaan meliputi administrasi umum, kepegawaian, surat menyurat, penyusunan program kegiatan dan pelaporan serta perencanaan dan keuangan.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. penyusunan program dan anggaran;
 - c. pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik negara/daerah; dan
 - d. pengelolaan urusan kepegawaian.

Bidang Pengendalian Penduduk

Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pengendalian Penduduk. Bidang pengendalian penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pengendalian penduduk;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian penduduk;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian penduduk; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Keluarga Berencana. Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja keluarga berencana;
- b. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan keluarga berencana;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan keluarga berencana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan

Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Perempuan. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja pemberdayaan perempuan;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan perempuan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan perempuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Anak

Bidang Perlindungan Anak dalam mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan Perlindungan Anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja perlindungan anak;
- b. perumusan kebijakan teknis perlindungan anak;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan anak;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam menyelenggarakan fungsi:

- a penatausahaan administrasi perkantoran;
- b pengelolaan dokumen kepegawaian;
- c pengelolaan perlengkapan perkantoran;
- d pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan Dinas. Sub Bagian Keuangan dalam, menyelenggarakan fungsi:

- a perencanaan pengelolaan keuangan;
- b pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c penatausahaan keuangan;
- d verifikasi dan pembukuan laporan keuangan; dan
- e pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Fungsional Perencana

Fungsional Perencana mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan pelaksanaan Program, Data dan Evaluasi kegiatan di lingkungan Dinas. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi, menyelenggarakan fungsi:

- a penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
- b perencanaan program, data dan evaluasi;
- c pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
- d pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Pengendalian Penduduk

Membantu Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dalam menyelenggarakan urusan advokasi dan kerjasama, dan melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja advokasi dan kerjasama;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis advokasi dan kerjasama;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan advokasi dan kerjasama;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan advokasi dan kerjasama; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya
- e. penyusunan rencana kerja data dan informasi;
- f. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis data dan informasi;
- g. pelaksanaan program dan kegiatan data dan informasi;
- h. pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- j. penyusunan rencana kerja pengendalian pergerakan penduduk;
- k. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pergerakan penduduk;
- l. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian pergerakan penduduk;
- m. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian pergerakan penduduk; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada Bidang Keluarga Berencana

Membantu Kepala Bidang Keluarga Berencana dalam menyelenggarakan urusan Bidang Keluarga Berencana sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan rencana kerja jaminan pelayanan keluarga berencana;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis jaminan pelayanan keluarga berencana;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan jaminan pelayanan keluarga berencana;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan jaminan pelayanan keluarga berencana; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja pembinaan dan peningkatan kesetaraan keluarga berencana;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan peningkatan kesertaan keluarga berencana; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Pada Bidang Pemberdayaan Perempuan

Membantu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dalam menyelenggarakan urusan bina ekonomi perempuan kepala keluarga dan tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan bina ekonomi perempuan kepala keluarga;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina ekonomi perempuan kepala keluarga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. Penyusunan rencana kerja bina sosial, politik dan hukum;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina sosial, politik dan hukum;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan bina sosial, politik dan hukum;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina sosial, politik dan hukum; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja bina kualitas keluarga;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bina kualitas keluarga;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan bina kualitas keluarga;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan bina kualitas keluarga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Dan Fungsi Fungsional Analisis Kebijakan pada Bidang Perlindungan Anak

Membantu Kepala Bidang Perlindungan Anak dalam menyelenggarakan urusan pada bidang perlindungan anak sebagai berikut:

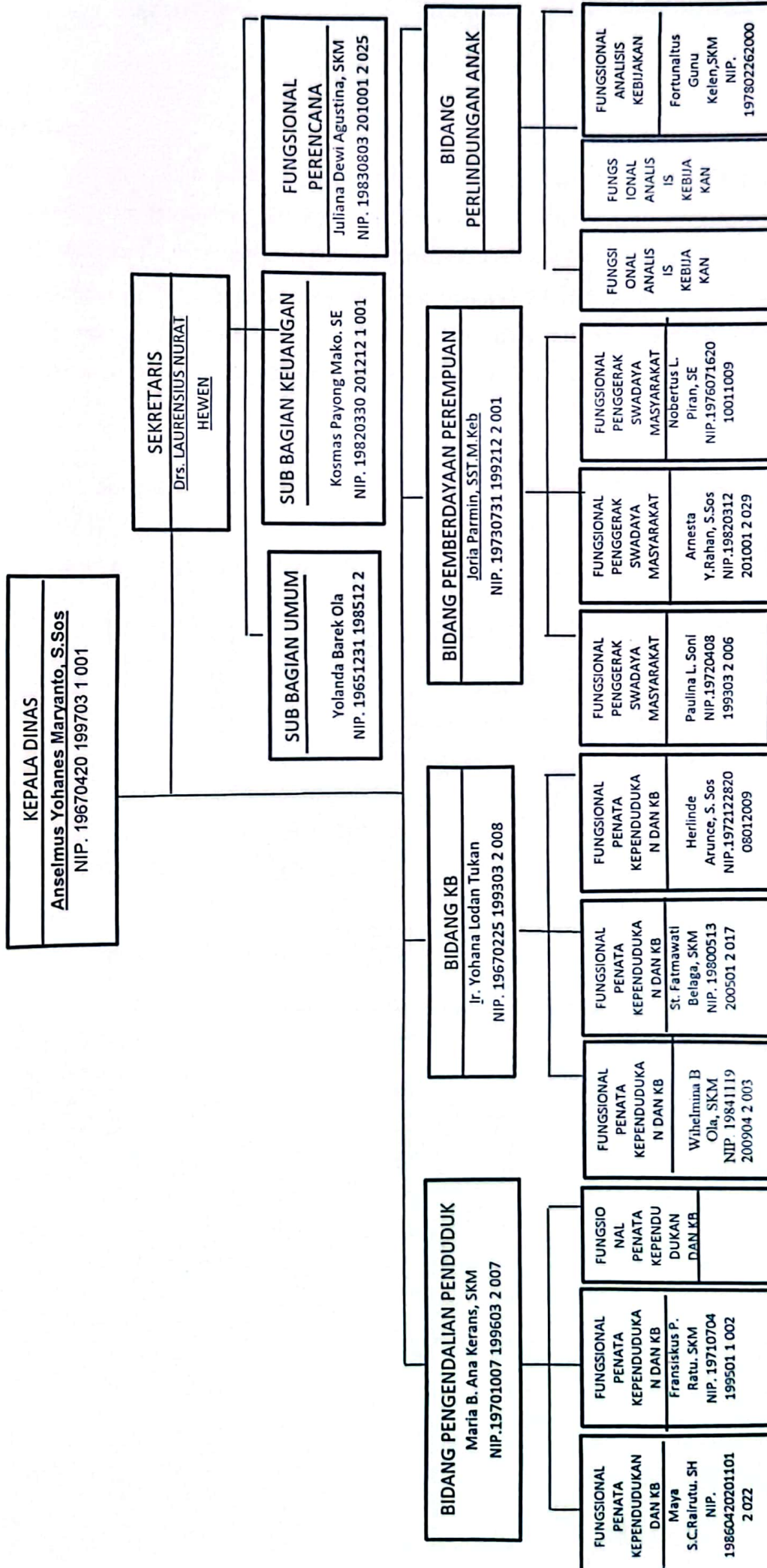
- a. penyusunan rencana kerja pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- c. pelaksanaan program dan kegiatan pengasuhan alternatif dan pendidikan;
- d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pengasuhan alternatif dan pendidikan; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- f. penyusunan rencana kerja hak sipil, informasi dan partisipasi;
- g. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis hak sipil, informasi dan partisipasi;
- h. pelaksanaan program dan kegiatan hak sipil, informasi dan partisipasi;
- i. pengendalian, evaluasi dan pelaporan hak sipil, informasi dan partisipasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- k. penyusunan rencana kerja kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- l. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- m. pelaksanaan program dan kegiatan kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- n. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur memiliki struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN FLORES TIMUR

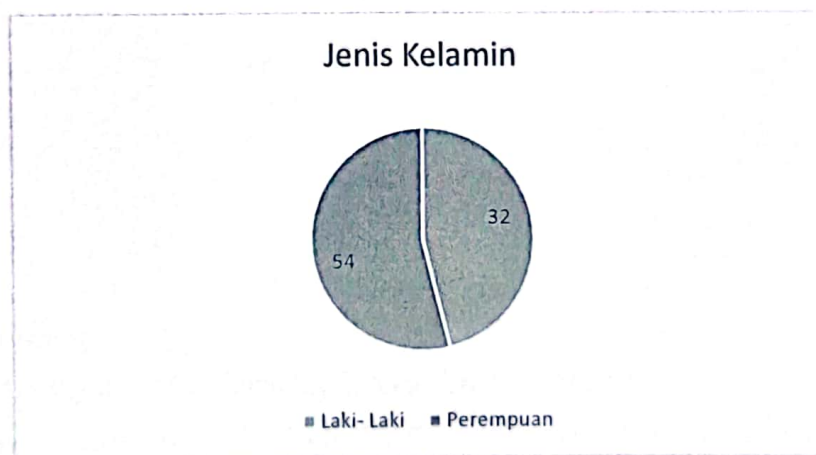


Sumber Daya

Hingga akhir tahun 2023, jumlah sumber daya manusia yang aktif di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 118 orang (termasuk PNS dan Non PNS PKB/PLKB). Bila dirinci, ASN yang penempatan di Dinas sebanyak 24 orang dan PPPK sebanyak 2 orang, non ASN sebanyak 8 orang, sedangkan untuk dilapangan PKB/PLKB PNS sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 44 orang dan non ASN sebanyak 43 orang.

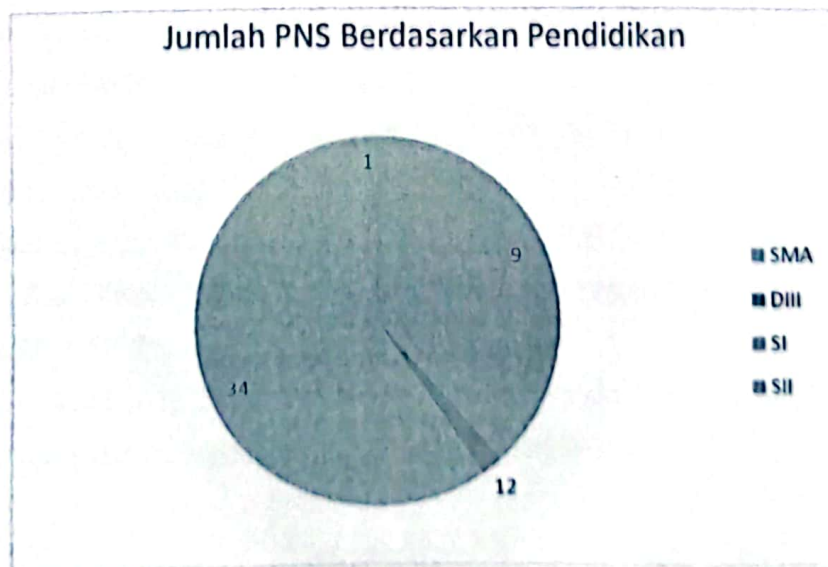
Gambar 1.1

Jumlah ASN Di Dinas dan Dilapangan berdasarkan Jenis Kelamin

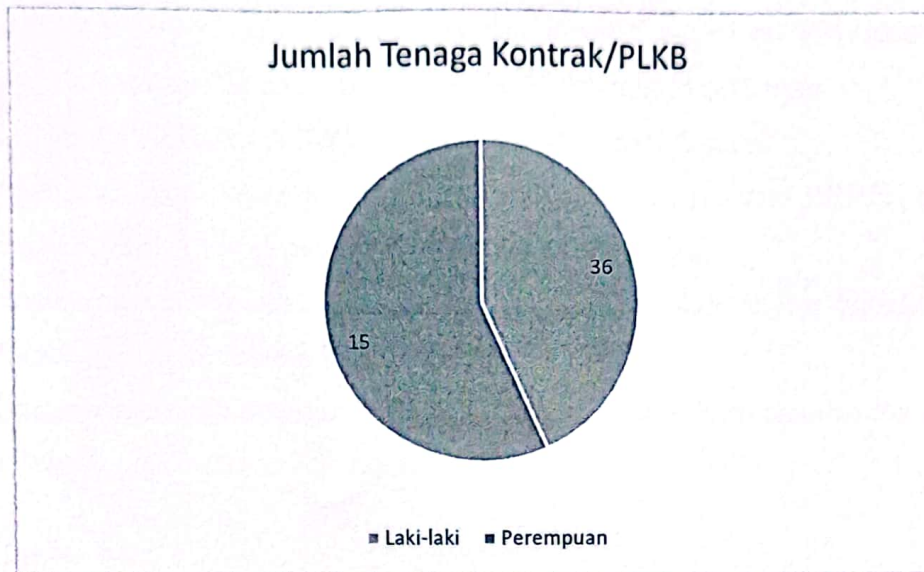


Gambar 1.2

Jumlah ASN Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Pendidikan



Gambar 1.3
Jumlah Tenaga Kontrak Di Dinas dan Lapangan Berdasarkan Jenis Kelamin



1.4 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 adalah:

1. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
5. Permenpan Nomor 53 tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;

1.5 Permasalahan dan Kelemahan

1. Belum memiliki Grand Design Kependudukan
2. Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB secara merata kepada masyarakat terutama di wilayah DTPK dan miskin perkotaan.
3. Rasio tenaga PKB dan PLKB dibanding dengan wilayah binaan.
4. Pengetahuan dan keterampilan pengelola dan pelaksana program KKBPK di tingkat Kabupaten/Kota masih rendah, karena sering terjadi mutasi.
4. Kuantitas maupun kualitas pencatatan dan pelaporan dari tingkat lapangan sering terlambat dan belum akurat.

Dukungan anggaran program KKBPK, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Pemerintah Daerah masih minim.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi Pembangunan Daerah

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur mendukung visi daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005- 2025 yakni ” **Flores Timur Yang Maju, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing**”, dengan misi pembangunan daerah yakni:

1. Mewujudkan daya saing
2. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
3. Mewujudkan manusia dan masyarakat bermoral dan berbudaya
4. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik

2.2 Perencanaan Kinerja

Dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026, ditetapkan tujuan, sasaran dan indikator jangka menengah serta target kinerjanya disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
			2021	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,2	3,1	3	2,8	2,6
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	19	18	17
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	25	23	21	19

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dengan mempedomani Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025, serta rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023-2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksud ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang berfokus pada tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur. Penjelasan tentang Indikator Kinerja Utama tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3

Penjelasan Indikator Kinerja Utama DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL FORMULA /RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kinerja Bangsa Kencana	Cakupan peserta KB aktif	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
		Cakupan	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Laporan pelaksanaan kegiatan	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
		Akseptor Baru	Berencana	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		$\frac{\text{Jumlah Peserta Keluarga Berencana}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100\%$
2	Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat tentang program KB	Angka Kelahiran Total (TFR)	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\text{TFR} = 5 \sum_{i=1}^7 \text{ASFR}_i$ $\text{ASFRI} = \frac{b_i}{p_i} \times k$ ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, i=3 untuk kelompok umur 25-29, i=4 untuk kelompok umur 30-34, i=5 untuk kelompok umur 35-39, i=6 untuk kelompok umur 40-44, i=7 untuk kelompok umur 45-49)
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	$\frac{\text{Indeks Pembangunan Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Laki-Laki}} \times 100\%$

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL FORMULA /RUMUS PERHITUNGAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	
5	Meningkatnya Keberdayaan Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan	

2.4 Rencana Kerja Tahunan

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdiri atas sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran sebagaimana termuat di dalam dokumen Rencana Strategis Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur Tahun 2023- 2026 dan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur 2023.

Tabel 2.4

**Tabel Kinerja Tahunan (RKT) Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur
Tahun 2023**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-2023
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,1
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,1
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	20
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2023

Peraturan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riview Atas Laporan Kinerja, menyatakan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan demikian, maka perjanjian kinerja adalah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta berdasarkan sumberdaya yang tersedia. Dalam hal ini Bupati Flores Timur sebaga pemberi amanah kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur sebagai penerima amanah.

Tabel 2.5
Penetapan Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian
			TAHUN 2023	TAHUN 2023
			TARGET	
1	2	3	4	5
	Indikator Kinerja Berdasarkan Tujuan dan Sasaran RPD			
	Indikator Kinerja Berdasarkan Penyelenggaraan Urusan			
	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			
	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	3	3	
	Angka Kelahiran Total (TFR)	3,2	3,1	2,58

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian
			TAHUN 2023	TAHUN 2023
			TARGET	
1	2	3	4	5
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) Peserta KB Aktif (mCPR)	52,51%	53,63	42,81
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	27,95	22	35,43
	Ratio Akseptor KB	51,24	69	62
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling remaja/mahasiswa	15,78	16	
Urusan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Indeks Pembangunan Gender	91,32	92,24	92,08
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	84

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target	Capaian
			TAHUN 2023	TAHUN 2023
			TARGET	
1	2	3	4	5
	Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak (Kasus)		25	84
	Persentase partisipasi perempuan di sector public	45,722	46	
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	3,3	3,3	0,3
	Rasio KDRT	0	0	
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	47,17	47,5	

Sasaran strategis beserta indikator dan target kinerja tersebut direncanakan dapat dicapai melalui program pembangunan dan anggaran prioritas sebagai berikut:

Tabel 2.5.1

Program dan Anggaran Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				214.921.550			191.905.370	
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)		47%	49.986.100		47%		
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)		5	19.986.470		5		
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kabupaten/Kota (perangkat daerah)	Larantuka	5 Perangkat Daerah	19.986.470	Larantuka	5 Perangkat Daerah	19.986.470	APBD II (DAU)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumbe r Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)		1 Dok	29.999.630		1 Dok	29.999.630	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	19 Kec	10 Organisasi	29.999.630	19 Kec	10 Organisasi	29.999.630	DAU Spseifi k Grand
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)		0,001%	19.995.510		0,001%	49.965.510	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan (orang)		24 Orang	19.995.510		24 Orang	49.965.510	
Peningkatan Kapasitas sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (orang)	Lara ntuk a	24 Orang	19.995.510	Larant uka	24 Orang	49.965.510	APBD II (DAU)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumbe r Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		Tingkat Madya	99.940.365		Tingkat Madya	98.940.285	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		1 Dok	49.999.890		1 Dok	49.999.810	
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (laporan)	Lara ntuk a	1 Dok	49.999.890	Larant uka	1 Dok	49.999.810	DAU Spseifi k Grand
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)		4 Lemba ga	29.941.125		4 Lembaga	28.941.125	
Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	Lara ntuk a	4 Lemba ga	29.941.125	Larant uka	4 Lembaga	28.941.125	DAU Spseifi k Grand

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumbe r Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)		1 Lapora n	19.999.350		1 Laporan	19.999.350	
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (layanan)	Lara ntuk a	1 Layana n	19.999.350	Larant uka	1 Layanan	19.999.350	APBD II (DAU)
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER	Persentase Desa/Kel menyediakan Data Gender (%)		25%	24.999.675		25%	24.999.675	
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota		1 Dok	24.999.675		1 Dok	24.999.675	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Lara ntuk a	1 Dok	24.999.675	Larant uka	1 Dok	24.999.675	APBD II (DAU)
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		0,02%			0,02%		
	Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (%)		8%	19.999.900		8%	19.999.900	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumbe r Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)		35 Orang	19.999.900		35 Orang	19.999.900	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	Lara ntuk a	35 Orang	19.999.900	Larant uka	35 Orang	19.999.900	APBD II (DAU)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.018.969.254			10.058.009.568	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)		7 Dok	383.926.760		7 Dok	383.926.760	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan		6 Dok	383.926.760		6 Dok	383.926.760	
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	Lara ntuk a	1 Dok	19.999.900	Larant uka	1 Dok	19.999.900	APBD II (DAU)
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga			101.086.860			101.086.860	APBD II (DAU)
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			185.400.000			185.400.000	APBD II (DAU)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			77.440.000			77.440.000	APBD II (DAK)
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)							
	Cakupan Akseptor Baru (%)			7.737.042.494			7.783.837.808	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengednalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengednalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1	1.593.368.000		1	1.593.368.000	
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		1	201.000.000		1	201.000.000	
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Larantuka	1 Dok	150.000.000	Larantuka	1 Dok	150.000.000	APBD II (DAK)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumbe r Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	19 Kec	1 Lap	243.200.000	19 Kec	1 Lap	243.200.000	APBD II (DAK)
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)			914.938.000			914.938.000	APBD II (DAK)
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			84.230.000			84.230.000	APBD II (DAK)
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		1	1.309.200.000		1	1.356.400.000	
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	19 Kec	15 Organisasi	290.000.000	19 Kec	15 Organisasi	290.000.000	APBD II (DAK)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tahap Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KBPK untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) (Laporan)	19 Kec	1 Lap	519.200.000	19 Kec	1 Lap	566.400.000	DAU Spesifik Grand
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1	500.000.000		1	500.000.000	APBD II (DAK)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		5 Jenis	3.568.875.894		5 Jenis	3.568.471.208	
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (laporan)	19 Kec	1 Laporan	36.300.000	19 Kec	1 Laporan	36.300.000	APBD II (DAK)
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). (orang)	19 Kec	200 orang	2.082.234.974	19 Kec	200 orang	2.082.234.974	APBD II (DAK)
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	Larantuka	5 unit	1.442.970.920	Larantuka	5 unit	1.442.868.234	APBD II (DAK)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kekegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Loka si	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumbe r Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringsnya		1	7.370.000		1	7.370.000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		5 Organi sasi	1.265.598.600		5 Organisasi	1.265.598.600	
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	Lara ntuk a	5 Organi sasi	29.293.600	Larant uka	5 Organisasi	29.293.600	DAU Spseifi k Grand
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	19 Kec	8 Dok	849.380.000	19 Kec	8 Dok	849.380.000	APBD II (DAK)
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		1	386.925.000		1	386.925.000	APBD II (DAK)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023						
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana
2		4	5	6	4	5	7	8
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)		0,001			0,001		
	Persentase Balita yang mengikuti KOBER PAUD (%)		80	1.898.000.000		80	1.890.245.000	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)		BKB:135, BKR:52, BKL:41, PIKR:54, UPPKS:57	1.898.000.000		BKB:135, BKR:52, BKL:41, PIKR:54, UPPKS:57	1.890.245.000	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1	396.000.000		1	388.245.000	APBD II (DAK)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS (orang)	Larantuka	61	1.502.000.000	Larantuka	61	1.502.000.000	APBD II (DAK)

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur diukur berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Pengukuran capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara target rencana kinerja dengan realisasinya. Pencapaian sasaran strategis sesuai indikator dan target kinerja pada tahun 2023, yang disajikan secara berurutan mulai dari penetapan target, realisasi, capaian kinerja tahunan serta perbandingan capaian kumulatif sampai tahun 2023 terhadap target maupun capaian Renstra DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur.

3.1.1 Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Peran Perempuan Anak, serta Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak

Sasaran Strategis pertama di dalam perjanjian Kinerja DP2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, adapun pencapaian sasaran strategis ini mengacu pada indikator Persentase Peserta KB Aktif dan Persentase Akseptor Baru. Dalam Renstra DP2KBP3A tahun 2023- 2026 target yang ditetapkan untuk sasaran strategis ini pada tahun 2023 adalah sebesar 53,63 untuk Cakupan Peserta KB Aktif 42,81 dan untuk Cakupan Akseptor Baru 32,77, dan sasaran strategis meningkatnya peran perempuan anak, serta perlindungan terhadap perempuan mengacu pada indikator jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebesar 84 kasus dan jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan sebesar 84 kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3,1	3,0	2,8	2,6
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,2	3,1	3	2,8	2,6
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	19	18	17
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	25	23	21	19

Hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pencapaian Sasaran Strategis Dinas P2KBP3A Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Target	Realisasi
		2021	2023	2023
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	3,1	2,58
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,2	3,1	92,08
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	20	84
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	25	84

Dari tabel diatas dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran untuk tahun 2023 bahwa pada sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat pada cakupan Angka Kelahiran yang masih tinggi.

Sementara pada sasaran strategis meningkatnya peran Perempuan anak, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak bahwa Indeks Pembangunan Gender sudah pada tahap bai sementara jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi

Sebagai perbandingan capaian kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel : 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun Dasar	Realisasi	Target	Realisasi
		2021	2022	2023	2023
Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,2	2,93	3,1	2,58
Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,2		3,1	92,08

Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	24	25	20	84
Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	28	3	25	84

1.7 Realisasi Anggaran

1.7.1 Target dan Realisasi Belanja

Anggaran yang dialokasikan untuk Program/ Kegiatan Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 seluruhnya sebelum perubahan sebesar Rp. 13.078.990.138,- dan setelah mengalami perubahan sebesar Rp. 13.336.546.893,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.210.576.600 atau sebesar 84 %. Anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional dan belanja modal.

3.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Pada tahun 2023 Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur melaksanakan 2 (dua) Urusan, 9 (sembilan) Program 22 (dua puluh dua) Kegiatan dan 53 (lima puluh tiga) Kegiatan dalam mewujudkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur. Adapaun hasil pengukuran terhadap kinerja keuangan dari program dan kegiatan strategis tersebut dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.2.2
Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan
untuk Mendukung Pencapaian Sasaran Strategi Dinas P2KBP3A
Kabupaten Flores Timur

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				214.921.550			193.905.370			238.485.570
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Perempuan yang berpartisipasi disektor publik(%)		47%	49.986.100		47%				49.561.100
Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Advokasi dan Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (perangkat daerah)		5	19.986.470		5				19.561.470

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) bagi Organisasi Pemerintah Kewenangan Kab/Kota (perangkat daerah)	Larantuka	5 Perangkat Daerah	19.986.470	Larantuka	5 Perangkat Daerah	19.986.470	APBD II (DAU)	35	19.561.470
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan Bidang Politik, Sosial dan Ekonomi dan Organisasi Masyarakat Kewenangan Kab/Kota (dokumen)		1 Dok	29.999.630		1 Dok	29.999.630			29.999.630

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kekegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kab/Kota (organisasi)	19 Kec	10 Organisasi	29.999.630	19 Kec	10 Organisasi	29.999.630	DAU Spesifik Grand	10 Organisasi	29.999.630
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga yang terselesaikan (%)		0,001%	19.995.510		0,001%	49.965.510			49.665.510
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Sumber Daya Manusi Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Tingkat Daerah Kab/Kota yang mendapat Penguatan dan Pengembangan (orang)		24 Orang	19.995.510		24 Orang	49.965.510			49.665.510

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Peningkatan Kapasitas sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kab/Kota (orang)	Larantuka	24 Orang	19.995.510	Larantuka	24 Orang	49.965.510	APBD II (DAU)	64	49.665.510
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Peringkat Pusat pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berhasil dicapai		Tingkat Madya	99.940.365		Tingkat Madya	98.940.285			95.540.285
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Laporan KIE dan Pengembangan, Kegiatan Masyarakat untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak (dokumen)		1 Dok	49.999.890		1 Dok	49.999.810			47.639.810
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kab/Kota (laporan)	Larantuka	1 Dok	49.999.890	Larantuka	1 Dok	49.999.810	DAU Spseifik Grand	1 Dok	47.639.810

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/Sub Kekegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga) Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Penguatan (Lembaga)		4 Lembaga	29.941.125		4 Lembaga	28.941.125			28.941.125
Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan (lembaga)	Larantuka	4 Lembaga	29.941.125	Larantuka	4 Lembaga	28.941.125	DAU Spseifik Grand	4 Lembaga	28.941.125
Penyediaan Layanan Bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Data Gender dan Anak, untuk Dimanfaatkan dalam Pengambilan Kebijakan Anak Kabupaten/Kota (laporan)		1 Laporan	19.999.350		1 Laporan	19.999.350			18.959.350

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/S ub Kekegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota (layanan)	Larantuka	1 Layanan	19.999.350	Larantuka	1 Layanan	19.999.350	APBD II (DAU)	1 Layanan	18.959.350
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA DAN GENDER	Persentase Desa/Kel menyediakan Data Gender (%)		25%	24.999.675		25%	24.999.675			24.999.675
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota		1 Dok	24.999.675		1 Dok	24.999.675			24.999.675
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/ Kota	Larantuka	1 Dok	24.999.675	Larantuka	1 Dok	24.999.675	APBD II (DAU)	1 Dok	24.999.675
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak (%)		0,02%	19.999.900		0,02%	19.999.900			18.719.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kekegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota (orang)	Larantuka	35 Orang	19.999.900	Larantuka	35 Orang	19.999.900	APBD II (DAU)	35 Orang	18.719.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				10.018.969.254			10.058.009.568			8.255.229.170
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah dokumen Pengendalian Penduduk (Dokumen)		7 Dok	383.926.760		7 Dok	383.926.760			364.848.600
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah dokumen penyediaan pengolahan data kependudukan		6 Dok	383.926.760		6 Dok	383.926.760			364.848.600
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (dokumen)	Larantuka	1 Dok	19.999.900	Larantuka	1 Dok	19.999.900	APBD II (DAU)	1 Dok	19.993.300
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan			101.086.860			101.086.860	APBD II (DAK)	12 Lap	94.555.300

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
keluarga	Sistem Informasi keluarga									
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			185.400.000			185.400.000	APBD II (DAK)	3 Lap	185.400.000
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB			77.440.000			77.440.000	APBD II (DAK)	12 Lap	64.900.000
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan PUS Peserta KB Aktif (%)									
	Cakupan Akseptor Baru (%)			7.737.042.494			7.783.837.808			6.000.535.570
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengednalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengednalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		1	1.593.368.000		1	1.593.368.000			1.469.805.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholder dan Mitra Kerja		1	201.000.000		1	201.000.000		6 Lap	201.000.000
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Larantuka	1 Dok	150.000.000	Larantuka	1 Dok	150.000.000	APBD II (DAK)	3 Lap	47.275.000
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Minilokakarya (Minilok)	19 Kec	1 Lap	243.200.000	19 Kec	1 Lap	243.200.000	APBD II (DAK)	4 Lap	243.200.000

Urutan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)			914.938.000			914.938.000	APBD II (DAK)	8 Lap	894.900.000
Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			84.230.000			84.230.000	APBD II (DAK)	2 Lap	83.430.000
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		1	1.309.200.000		1	1.356.400.000			1.239.600.000
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)	19 Kec	15 Organisasi	290.000.000	19 Kec	15 Organisasi	290.000.000	APBD II (DAK)	15 Organisasi	290.000.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerak, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas KB/Penyuluh Lapangan KB (PKB/PLKB) (Laporan)	19 Kec	1 Lap	519.200.000	19 Kec	1 Lap	566.400.000	DAU Spesifik Grand	1 Lap	449.600.000
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		1	500.000.000		1	500.000.000	APBD II (DAK)	500	500.000.000
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota	Jumlah Jenis Alat Kontrasepsi yang didistribusikan dan Sarana Penunjang Pelayanan KB di Daerah Kab/Kota		5 Jenis	3.568.875.89 4		5 Jenis	3.568.471.20 8			2.026.526.970

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kekegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya (laporan)	19 Kec	1 Laporan	36.300.000	19 Kec	1 Laporan	36.300.000	APBD II (DAK)	1 Laporan	36.300.000
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), (orang)	19 Kec	200 orang	2.082.234.974	19 Kec	200 orang	2.082.234.974	APBD II (DAK)	2414 orang	751.826.000
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (unit)	Larantuka	5 unit	1.442.970.920	Larantuka	5 unit	1.442.566.234	APBD II (DAK)	5 unit	1.231.030.970
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejarinya		1	7.370.000		1	7.370.000		1 Kali	7.370.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kekegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		5 Organisasi	1.265.598.600		5 Organisasi	1.265.598.600			1.264.603.600
Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB (organisasi)	Larantuka	5 Organisasi	29.293.600	Larantuka	5 Organisasi	29.293.600	DAU Spesifik Grand	5 Organisasi	28.298.600
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (dokumen)	19 Kec	8 Dok	849.380.000	19 Kec	8 Dok	849.380.000	APBD II (DAK)	10 Dok	849.380.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		1	386.925.000		1	386.925.000	APBD II (DAK)	1 Lap	386.925.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase remaja Perempuan Umur 15-19 tahun menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama (%)		0,001			0,001				
	Persentase Balita yang mengikuti KOBAR PAUD (%)		80	1.898.000.000		80	1.890.245.000			1.889.845.000
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling		BKB:135, BKR:52, BKL:41, PIKR:54, UPPKS:57	1.898.000.000		BKB:135, BKR:52, BKL:41, PIKR:54, UPPKS:57	1.890.245.000			1.889.845.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kekegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan					
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana	Kinerja	Target
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
	Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Landia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)									
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			1	396.000.000		1	388.245.000	APBD II (DAK)	32 paket	388.245.000
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga UPPKS (orang)	Larantuka	61	1.502.000.000	Larantuka	61	1.502.000.000	APBD II (DAK)	10 Lap	1.501.600.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. 10.233.890.804 dan setelah perubahan menjadi Rp. 10.251.914.938 yang digunakan untuk pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, dengan realisasi sebesar Rp. 8.493.714.740 atau sebesar 82 %

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program/ kegiatan utama Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur, maka Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur juga melaksanakan program/ kegiatan rutin yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Rutin DP2KBP3A
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sum ber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				13.078.990.138			13.336.546.893			11.210.578.600
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.845.099.334			3.084.631.955			2.716.863.860
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Tingkat Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)		100%	2.845.099.334		100%	3.084.631.955			2.716.863.860
	Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana Aparatur (%)		75%			75%				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi (%)		50%			50%				
	Persentase Perencanaan dan Polaporan capaian kinerja dan keuangan (%)		100%			100%				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi (dok)		8	51.494.380		8	71.395.220			59.630.820
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dok)	Laranyuka (OPD)	2 Dok	14.994.700	Laranyuka (OPD)	2 Dok	34.895.540	APB D II (DAU)	2	34.635.820
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dok)	Larantuka (OPD)	2 Dok	11.999.940	Larantuka (OPD)	2 Dok	11.999.940	APB D II (DAU)	2	11.857.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (laporan)	Larantuka (OPD)	4 Laporan	11.999.780	Larantuka (OPD)	4 Laporan	11.999.780	APB D II (DAU)	4	11.800.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Larantuka (OPD)	4 Dok	12.499.960	Larantuka (OPD)	4 Dok	12.499.960	APB D II (DAU)	4	1.338.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan (dok)		3	2.269.488.214		3	2.448.783.599			2.196.274.992
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (org/bulan)	Larantuka (OPD)	28 orang/12 bulan	2.207.088.554	Larantuka (OPD)	28 orang/12 bulan	2.386.383.939	APB D II (DAU)	28 orang/12 bulan	2.140.184.992
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen)		1	47.400.000		1	47.400.000		1	41.100.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Larantuka (OPD)	2 Lap	14.999.660	Larantuka (OPD)	2 Lap	14.999.660	APB D II (DAU)	2	14.990.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (dok)	Larantuka (OPD)		7.499.620	Larantuka (OPD)		7.499.620			7.250.000

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Larantuka (OPD)	1 Lap	7.499.620	Larantuka (OPD)	1 Lap	7.499.620	APB D II (DAU)	1	7.250.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)		1	9.995.000		1	9.995.000			11.873.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Larantuka (OPD)	1 Dok	9.995.000	Larantuka (OPD)	1 Dok	9.995.000	APB D II (DAU)	1	11.873.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana kantor (%)		1	174.553.320		1	217.491.740			215.287.725
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan (Paket)	Larantuka (OPD)	2	1.973.660	Larantuka (OPD)	2	1.973.660	APB D II (DAU)	2	1.973.660
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket perlengkapan gedung kantor yang disediakan (paket)	Larantuka (OPD)	3 Paket ATK	19.997.700	Larantuka (OPD)	3 Paket ATK	24.936.700	APB D II (DAU)	3 Paket ATK	24.743.350
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan (Paket)	Larantuka (OPD)	1 Paket	7.498.500	Larantuka (OPD)	1 Paket	7.498.500	APB D II (DAU)	1 Paket	7.417.350
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Larantuka (OPD)	12	54.998.800	Larantuka (OPD)	12	67.998.400	APB D II (DAU)	12	66.116.465

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Tarhet Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan (paket)	Larantuka (OPD)	1 Paket	24.999.660	Larantuka (OPD)	1 Paket	24.999.660	APB D II (DAU)	1 Paket	24.972.700
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (laporan)	Larantuka (OPD)	12 Laporan	15.000.000	Larantuka (OPD)	12 Laporan	15.000.000	APB D II (DAU)	12 Laporan	15.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Larantuka (OPD)	12 Laporan	50.085.000	Larantuka (OPD)	12 Laporan	75.084.820	APB D II (DAU)	12 Laporan	75.064.200
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (unit)		11 Unit	25.017.500		11 Unit	26.017.476			4.300.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan (unit)	Larantuka (OPD)	3 Unit	25.017.500	Larantuka (OPD)	3 Unit	26.017.476	APB D II (DAU)	3 Unit	4.300.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah(%)		90	191.089.800		90	197.489.800			127.482.300
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat (laporan)	Larantuka Ibukota Kabupaten	12 Laporan	1.499.800	Larantuka Ibukota Kabupaten	12 Laporan	1.499.800	APB D II (DAU)	12 Laporan	1.271.200
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan(laporan)	Larantuka (OPD)	12 Laporan	35.990.000	Larantuka (OPD)	12 Laporan	35.990.000	APB D II (DAU)	12 Laporan	27.811.100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Satuan)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2023							Realisasi	
		Sebelum Perubahan			Setelah Perubahan				Kinerja	Target
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp,-)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	PAGU Setelah Perubahan	Sumber Dana		
2		4	5	6	4	5	7	8	9	10
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (laporan)	19 Kec dan OPD	12 (93 orang)	153.600.000	19 Kec dan OPD	12 (93 orang)	160.000.000	APB D II (DAU)	12 (Borng)	98.400.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)		90	115.961.500		90	105.959.500			94.765.023
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Larantuka (OPD)	32 Unit	70.600.000	Larantuka (OPD)	32 Unit	51.000.000	APB D II (DAU)	3	49.492.023
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/dir ehabilitasi (unit)	Larantuka (OPD)	1 Unit	33.911.500	Larantuka (OPD)	1 Unit	27.009.500	APB D II (DAU)	1 Unit	22.728.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Re habilitasi (unit)	Larantuka (OPD)	9 Unit	4.950.000	Larantuka (OPD)	9 Unit	21.450.000	APB D II (DAU)	5 Unit	17.345.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Re habilitasi (unit)	Larantuka (OPD)	2 Unit	6.500.000	Larantuka (OPD)	2 Unit	6.500.000	APB D II (DAU)	2 unit	5.200.000

Tabel teraebut menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah dialokasikan belanja sebesar Rp. **2.845.099.334** dan setelah mengalami perubahan menjadi Rp. **3.084.631.955,-** yang digunakan untuk Program/Kegiatan rutin Dinas P2KBP3A, dengan realisasi sebesar Rp. **2.716.863.860** atau 88 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kinerja Perangkat Daerah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023. Penyusunan laporan ini merupakan langkah yang tepat dalam rangka memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas P2KBP3A tahun 2023 memiliki nilai strategis, karena selain memberikan gambaran mengenai capaian kinerja perangkat daerah untuk tahun 2023, serta capaian target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023 ini, juga memberikan informasi realisasi keuangannya.

Berdasarkan gambaran tersebut maka dapat dikatakan bahwa kinerja Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur tahun 2023 sudah berkinerja dengan baik. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target dari indikator kinerja sasaran strategis Dinas P2KBP3A tahun 2023 masih belum dapat dicapai secara keseluruhan sedangkan realisasi penyerapan anggaran sebesar 84%

4.2 Rekomendasi Tindak Lanjut

Berbagai permasalahan yang dihadapi dan dirumuskan pemecahannya belumlah akan memberikan arti yang optimal bila tidak disertai dengan komitmen tindak lanjut untuk melaksanakan perbaikan. Hal ini dianggap penting agar LAKIP benar- benar berfungsi sebagai instrument yang efektif bagi peningkatan kinerja Pemerintahan dan perbaikan layanan public.

Memperhatikan segala macam kekurangan, terutama terhadap beberapa indikator ,kinerja yang pencapaian kinerja masih rendah atau pun belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, maka langka perbaikan di masa selanjutnya dipandang penting untuk dilakukan sebagai berikut:

1. Melaksanakan bimbingan/pelatihan secara berkala dan berkesinambungan bagi petugas lapangan khususnya pada pencatatan dan pelaporan.

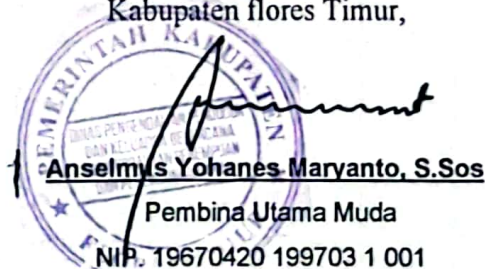
2. Memperkuat kerjasama sama dengan lembaga – lembaga dalam penyelenggaraan program Bangga Kencana.
3. Mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat dan obat kontrasepsi dan untuk program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Pembentukan forum data base terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta Adanya kebijakan daerah yang menyangkut tentang perlindungan perempuan dan anak.
5. Mengaktifkan kembali sistem pelaporan SIMFONI (Pelatihan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak).
6. Membuat Grand Design Kependudukan

Akhirnya atas segala kelemahan dan kekurangan yang terjadi kami sadari semata- mata karena kelemahan ketidaksempurnaan kami sebagai manusia, namun demikian, segala kekurangan dan ketidaksempurnaan itu menjadi motivasi untuk melakukan langkah- langkah perbaikan selanjutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP) Dinas P2KBP3A Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 ini disampaikan sebagai salah satu ikhtiar dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Larantuka, Januari 2024

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten flores Timur,


Anselmus Yohanes Maryanto, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19670420 199703 1 001

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BIDANG URUSAN	SKPD PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	DEFENISI OPERASIONAL	
						7	FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN
1	Meningkatnya Kinerja Bangsa Kencana	Cakupan peserta KB aktif	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$
1		Cakupan Akseptor Baru	Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		$\frac{\text{Jumlah Peserta Keluarga Berencana}}{\text{Jumlah Sasaran}} \times 100\%$
					Laporan pelaksanaan kegiatan		$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$
							$ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$
							ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu di pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama k = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24, i=3 untuk kelompok umur 25-29, i=4 untuk kelompok umur 30-34, i=5 untuk kelompok umur 35-39, i=6 untuk kelompok umur 40-44, i=7 untuk kelompok umur 45-49)
3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perempuan dan Anak	Indeks Pembangunan Gender	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		$\frac{\text{Indeks Pembangunan Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Laki-Laki}} \times 100\%$
4	Meningkatnya Keberdayaan Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		
5	Meningkatnya Keberdayaan Anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Laporan pelaksanaan kegiatan		

Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur
Anselmus Mahes Marjanto
NIP.19670420 199703 1 001

**RENCANA KERJA TAHUNAN
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)**

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Flores Timur
Tahun : 2024

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-2024
Meningkatnya kualitas Pengendalian Penduduk dan Layanan Keluarga Berencana	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	Angka TFR (%)	3,0
Meningkatnya Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (Point)	3,0
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Kasus)	19
	Menurunnya Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak	Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak (Kasus)	23

Larantuka, Januari 2024

/ Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Flores Timur,



Anselmus Vohanes Maryanto, S.Sos
NIP 19670420 199703 1 001